

Kajian Perbandingan Analisis Finansial Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Swasta

*I Kadek Pandi Beri Artana, ¹Anak Agung Inten Trisna,
²Gede Mekse Korri Arisena

¹Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Indonesia

²Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Indonesia

DOI: [10.46821/benchmark.v3i1.268](https://doi.org/10.46821/benchmark.v3i1.268)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk membandingkan analisis kelayakan finansial dan manajemen usaha pada dua jenis kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kepemilikan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah perkebunan kelapa sawit rakyat dan swasta di ada di wilayah Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan sumber pustaka dicari dari sistem aplikasi *Harzing* yang meliputi mengenai NPV, IRR, B/C Ratio, dsb pada perkebunan kelapa sawit swasta dan rakyat. Hasil dari kajian ini didapat pada aspek finansial perkebunan kelapa sawit swasta terdapat biaya reinvestasi yang di bebaskan pada biaya pengeluaran untuk usaha perkebunan kelapa sawit swasta, sedangkan pada rakyat tidak ada ditemukannya biaya reinvestasi yang dibebaskan pada pengeluarannya. Rata-rata perkebunan swasta menganalisis switching value untuk menyiapkan strategi menghadapi tantangan kedepan seperti penurunan produksi ataupun kenaikan biaya produksi. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi acuan kepada pengembang maupun pemerintah maupun stakeholder terkait.

Kata Kunci: Analisis Finansial, Kelapa Sawit, Perbandingan.

ABSTRACT

This study aims to compare the analysis of financial feasibility and business management on two types of oil palm plantation ownership in Indonesia. The ownership of the oil palm plantations is smallholder and private oil palm plantations in the territory of Indonesia. The method used is a literature study with library sources sought from the Harzing application system which includes the NPV, IRR, B/C Ratio, etc. on private and community oil palm plantations. The results of this study were found that in the financial aspect of private oil palm plantations, there were reinvestment costs that were charged to expenses for private oil palm plantations, while for the people there were no reinvestment costs charged to their expenses. On average, private plantations analyze switching values to prepare strategies to face future challenges, such as decreasing production or increasing production costs. Based on this, it is hoped that the results of this study can be a reference for developers and the government and related stakeholders.

Keywords: Financial Analysis, Palm Oil, Comparison.



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, harga CPO telah menyentuh rekor tertingginya sepanjang masa pada perdagangan di level RM 5.840 per ton untuk kontrak Mei 2022. Banyak faktor penyebab kenaikan harga CPO, di antaranya keterbatasan pasokan dari negara-negara produsen utama, konflik Rusia-Ukraina, tingginya harga minyak kedelai, serta pemotongan bea masuk impor sawit India. Ekspor minyak sawit Malaysia ke India juga berpeluang meningkat karena kebijakan potongan pajak impor dari 7,00% menjadi 5,00%. Ini ditambah dengan terbitnya peraturan pembatasan ekspor baru oleh Indonesia melalui kebijakan domestic market obligation (DMO) (Rahma, 2022).

Menurut data BPS (2020) Indonesia memiliki luas areal perkebunan sawit sebesar 14.586,597 Ha. Didukungnya luas perkebunan sawit yang dimiliki Indonesia akan mendorong jumlah produksi sawit Indonesia, jumlah produksi sawit Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan tercatat pada tahun 2018 sebesar 42.883,631 Ton, pada tahun 2019 sebesar 47.120,247 Ton, pada tahun 2020 tercatat sebesar 44.759,147 Ton. Pada data tersebut produksi sawit di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2020.

Luas perkiraan total perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 14,9 juta hektar (ha). Dari luasan tersebut, luas perkebunan rakyat sekitar 6,8 juta ha (46%), sedangkan perkebunan negeri memiliki sekitar 0,5 juta ha, dan sisanya perkebunan swasta seluas 8,4 juta ha (DIRJENBUN, 2020). Meskipun perkebunan rakyat hampir setengah dari total area, kontribusinya terhadap total produksi kelapa sawit di Indonesia hanya antara 27% dan 38% (Kemenperin, 2020).

Dalam upaya menstabilkan antara permintaan pasar global dan kebutuhan dalam negeri perlu mengetahui pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di Indonesia. Keberhasilan usaha dapat dilihat dari unsur biaya berdasarkan analisis kelayakan bisnis yang diterapkan. Aspek finansial melihat kelayakan suatu usaha dari kinerja keuangan perusahaan. Penilaian terhadap aspek keuangan meliputi sumber dana yang diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi yang dibutuhkan selama umur bisnis, proyeksi aliran kas (*cashflow*) dan laporan laba/rugi, dan kriteria penilaian investasi (Kasmir, 2003). Sumber dana yang digunakan untuk investasi sangat penting diperhitungkan. Dana yang berasal dari pinjaman maka kewajiban untuk membayar pinjaman beserta beban bunga yang dikenakan akan mempengaruhi aliran uang keluar dari perusahaan. Investasi besar dengan jangka waktu yang panjang akan mempengaruhi lamanya umur bisnis. Dengan melihat estimasi pendapatan suatu usaha selama umur bisnis yang sudah diperkirakan, akan dapat di analisis apakah usaha tersebut layak untuk dijalankan.

Kriteria penilaian investasi yang umumnya digunakan yaitu, (1) *Net Present Value* (NPV) Perhitungan NPV ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total manfaat bersih yang diperoleh suatu usaha dilihat pada nilai saat ini. Menurut Murdy dkk., 2021 NPV adalah nilai net benefit yang telah didiskontokan pada tingkat bunga tertentu dengan nilai $NPV > 0$ usaha perkebunan kelapa sawit layak untuk diusahakan serta memberikan keuntungan (2) IRR adalah suatu nilai petunjuk yang identik dengan seberapa besar suku bunga yang dapat diberikan oleh investasi tersebut dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku umum (*Minimum Attractive Rate of Return/MARR*). Padasuku bunga IRR akan diperoleh NPV=0, dengan kata lain bahwa IRR tersebut mengandung

makna suku bunga yang dapat diberikan investasi, yang akan memberikan $NPV = 0$. (Pujiharti & Hafif, 2017), (3) *Benefit Cost Ratio* (BCR) Analisis ini bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya penerimaan dibandingkan dengan pengeluaran selama umur ekonomis kebun sawit. Perolehan nilai $B/C > 0$ berarti usaha perkebunan kelapa sawit layak untuk diusahakan. (4) *Pay Back Period* (PBP) *Payback Period* bertujuan untuk melihat jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan biaya investasi, yang nilainya akan dibandingkan dengan umur usaha kebun sawit (Murdy dkk., 2021).

Produksi kelapa sawit Indonesia tercatat masih jauh dari potensi produksi yang diharapkan, dimana masih banyaknya menggunakan bibit sawit ilegal, serta penerapan, penerapan kultur teknis yang belum maksimal, dan presentase tanaman tua yang masih tinggi. Pemerintah dan pihak terkait masih berupaya memperkuat perbaikan mekanisme dari perkebunan kepala sawit, seperti Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) dengan sinergi antar lembaga sebagai upaya meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dimana pada prinsip 2 mencatat penerapan praktik perkebunan yang baik. Poin tersebut dapat dijalankan dengan, menyediakan benih/bibit unggul kelapa sawit, kemudian melakukan rekomendasi pemupukan & bantuan teknis kebun, pengawalan kebun dan evaluasi produktivitas, pengendalian HPT, supervise pembibitan, due diligence, supervisi pembangunan kebun, serta studi kelayakan. Dengan diketahui bahwa setiap bentuk kepemilikan usaha perkebunan kelapa sawit ini memiliki teknik pengelolaan yang berbeda. Maka dengan adanya perbandingan antara kedua model kelayakan bisnis tersebut mampu menunjukkan perbandingan input dan output yang terjadi di perusahaan, mengetahui kunci pengembangan agar bersinergi dengan baik dalam memenuhi permintaan pasar, manakah yang lebih efektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian pada kajian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbandingan manajemen usaha dari perkebunan kelapa sawit rakyat dan swasta, dan (2) mengetahui perbandingan finansial usaha dari perkebunan kelapa sawit rakyat dan swasta.

METODE PENELITIAN

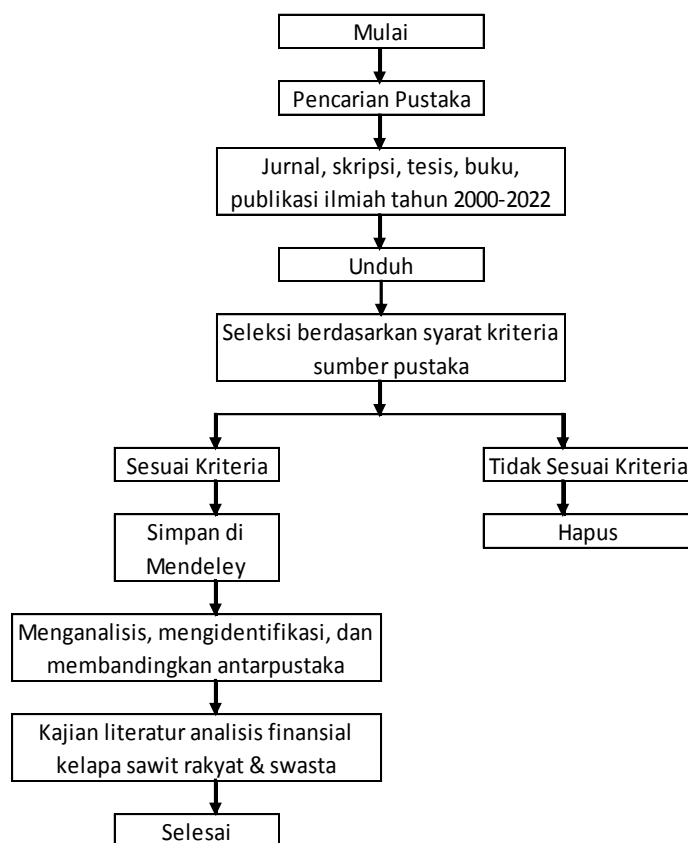
Waktu Telaah Pustaka

Studi ini dilaksanakan mulai dari bulan April hingga Mei 2022 melalui beberapa tahapan kajian pustaka, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.

Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang digunakan berupa telaah pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa publikasi ilmiah dari tahun 2000 hingga 2022 mengenai analisis kelayakan finansial kelapa sawit. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis, buku, dan literatur lain dari internet yang sumber informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria sumber pustaka yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber pustaka bersifat primer.
- b. Sumber pustaka merupakan publikasi ilmiah nasional maupun internasional.
- c. Sumber pustaka berfokus pada penelitian kelayakan finansial kelapa sawit
- d. Sumber pustaka memiliki informasi mengenai NPV, IRR, B/C Ratio, dsb pada perkebunan kelapa sawit swasta dan rakyat.
- e. Sumber pustaka dipublikasikan dalam rentang waktu 2000 hingga 2022.



Sumber: Data Primer, 2022

Gambar 1
Diagram Alir Penelitian

Sumber pustaka dicari dari sistem aplikasi Harzing yang terhubung pada *Crossref*, *PubMed*, *Google Scholar*, dll dan melalui internet di beberapa laman situs. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian pustaka, yaitu kelayakan finansial “kelayakan finansial kelapa sawit”. Sumber pustaka yang diperoleh kemudian diunduh, lalu diseleksi sesuai kriteria yang diinginkan dan disimpan di dalam Mendeley. Publikasi Ilmiah yang sesuai dengan kriteria selanjutnya dianalisis, diidentifikasi, dan dibandingkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Metode yang digunakan yaitu metode studi literature dengan menggunakan alat pengumpul data kemudian mengungkapkan berbagai teori yang sesuai dan tepat dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil kajian yang diambil dari berbagai buku-buku yang dianggap sesuai terhadap isi kajian. Nazir (2014), mengartikan studi literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah awal untuk merencanakan suatu alur pada penelitian dengan memanfaatkan kepustakaan untuk

memperoleh data dilapangan tanpa terjun secara langsung mencari data (wawancara dan observasi).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Manajemen Usaha

Perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan yang kerap memerlukan usaha yang maksimal dari proses penanaman sampai panen, maka dengan ini perlu diketahui bagaimana upaya yang dilakukan pada masing-masing usaha tersebut. Manajemen pada perkebunan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan, dimana manajemen diperlukan pada proses produksi, struktur organisasi/SDM, lingkungan, dan keuangan. Perkebunan kelapa sawit swasta yang dinilai dari kajian ini berada di wilayah Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, dan Aceh

Pertama dalam perencanaan sebuah proyek perkebunan, perlu diketahui luasan lahan berdasarkan penelitian (Sarasvaty, 2018) pada PT XYZ berencana mengembangkan lahan produksinya sebesar 1000 hektar (Ha), kemudian PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) pada penelitian (Irawan & Pamungkas, 2020) berencana membangun kebun kelapa sawit seluas ± 14.000 hektar (Ha) yang akan dilakukan penanaman kelapa sawit selama 3 (tiga) tahun dan perkebunan kelapa sawit CV. VSL menurut (FoEh, 2011) berencana membangun di daerah Gondai dengan luas 100 Ha.

Analisis aspek manajemen dan organisasi dilakukan secara deskriptif dengan melihat struktur organisasi, deskripsi per jabatan, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan (Nurmalina dkk., 2018). Bisnis dinyatakan layak jika memiliki struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas disetiap jabatan secara jelas. Manajemen usaha proses produksi pada usaha milik swasta yaitu PT XYZ memiliki pemaparan yang jelas mengenai proses produksi yang dilakukan, mulai dari bahan tanaman dan pembibitan yang memilih menggunakan jenis Tenera, proses pembibitan dilakukan dalam dua tahap persemaian (*pre-nursery*) dan tahap pembibitan utama (*main nursery*). Kemudian teknik pemeliharaan yang jelas, dilanjutkan pada penanaman di lapangan, pemeliharaan tanaman, dan terakhir panen dan pengumpulan tandan buah segar (TBS). Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek teknis, secara umum tidak ditemukan hambatan atau kendala yang dapat mengganggu aktivitas proses produksi dan operasional perkebunan kelapa sawit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan perluasan perkebunan kelapa sawit seluas 1000 ha dari aspek teknis layak untuk dilaksanakan. Perkebunan milik swasta PT XYZ memiliki struktur organisasi yang jelas (General Manajer, Estate Manajer, Bagian Administrasi, Kepala Kebun dan Asisten Kepala, staf sejumlah total 21 orang dan tenaga harian) aspek organisasi manajerial dan ketersediaan kebutuhan tenaga kerja cukup mendukung dalam pengelolaan dan pengoperasian perkebunan tanaman kelapa sawit. Perusahaan milik swasta ini menerapkan pola kemitraan dengan pembagian inti 80 persen: plasma 20 persen.

Pada jenis kepemilikan yang kedua, yaitu pada kepemilikan jenis Perkebunan kelapa sawit rakyat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, merupakan himpunan dari masyarakat lokal dalam mengelola manajemen Perkebunan sawit pada daerahnya sendiri. Struktur organisasi pada Perkebunan sawit rakyat lebih mengedepankan keanggotaan Perkebunan namun berpedoman pada manajemen usaha. Berdasarkan penelitian (Putri dkk., 2013) Pada kategori Manajemen usahanya

Perkebunan ini terdiri dari 57 KK dengan umur ekonomis sawit 0 sampai dengan 25 tahun. Kabupaten Riau memiliki luas perkebunan sawit milik rakyat yang mencapai 53 %. Pembibitan yang dilakukan pada Perkebunan sawit rakyat di Kecamatan Bagan Sinembah dimulainya dari kecambahan dan juga membeli bibit yang sudah siap tanam dengan umur bibit 1 tahun. Pada Perkebunan rakyat ini bekerjasama dengan KUD setempat guna menjual hasil sawit berupa tandan buah segar (TBS) kepada KUD dengan harga yang tinggi. Namun hanya sebagian kecil petani sawit menjadi anggota KUD.

Pada Perkebunan perkebunan sawit rakyat di Provinsi Lampung berkembang sejak 10 tahun terakhir dari jumlah produksi pada tahun 2014 kelapa sawit rakyat memiliki luas lahan sebesar 97.884 ha atau 48,2 % dari area luas sawit di Provinsi Lampung. Petani di Provinsi Lampung sebagian besar belum menerapkan teknologi maju seperti pemupukan NPK pada TBM, pupuk organik, benih bersertifikat dan teknologi konservasi. Menurut (Pujiharti & Hafif, 2017) pada kategori petani sawit rakyat rata – rata yang tersebar berumur dari 20 sampai dengan 76 tahun. Ketersediaan kebutuhan tenaga kerja juga di bantu tenaga kerja dari dalam keluarga. Anggota keluarga pada Perkebunan rakyat di Provinsi Lampung dengan rata – rata 2,94, terbanyak 9 orang dan ada yang sudah tidak punya tanggungan, dapat dikatakan bahwa jumlah anggota keluarga semakin banyak maka semakin besar kebutuhan hidup keluarga tersebut. Selain itu menurut (Kariyasa, 2015), dengan tingkat pendidikan yang lebih baik disertai pengalaman bertanam sawit yang lebih lama ini tentunya berpengaruh positif bagi petani dalam menentukan bibit sawit dan input produksi lainnya yang akan digunakan.

Perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Kabupaten Lampung Tengah memiliki areal tanaman kelapa sawit terluas kedua di Provinsi Lampung dengan besaran luas areal sebesar 29.180 ha. pada Perkebunan di Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa masalah antara lain, tanaman kelapa sawit belajar berbuah pada tahun keempat dan tahun kelima, sehingga pada tahun pertama sampai tahun ke tiga kelapa sawit belum bisa menghasilkan (TBM), jadi diperlukannya modal yang besar pada tahun tersebut dalam Perkebunan kelapa sawit. Rata – rata (TBM) kelapa sawit hanya 6,5 – 7,0 ton per hektar per tahunnya. Kondisi tersebut dikarenakan tidak menggunakan bibit unggul hingga minimnya perawatan serta lemahnya manajemen perkebunan (Alfizar dkk., 2017). Perkebunan milik rakyat di Kabupaten Lampung Tengah pada manajemen usahanya belum sebaik manajemen usaha milik swasta dikarenakan minimnya pengetahuan tentang teknologi serta manajemen pada pembibitan belum sebaik manajemen Perkebunan swasta. Petani di kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah populasi masyarakat yang menjadi petani yaitu sejumlah 172 petani.

Finansial Usaha

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit milik swasta menekankan kesiapan dari aspek finansial yakni dari penerimaan dan biaya selama umur usaha. Adapun arus penerimaan (inflow) perusahaan berasal dari penjualan tandan buah segar (TBS) dan nilai sisa. Total penerimaan untuk lahan seluas 1000 Ha diasumsikan selama 25 tahun adalah Rp 810.946.000.000 atau 32.437.840/tahun. Selanjutnya pengeluaran (outflow) terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Adapun biaya investasi yang dikeluarkan Perkebunan kelapa sawit swasta ini adalah biaya investasi tanaman, infrastruktur, bangunan, mesin, alat berat, kendaraan, dan inventaris.

Biaya investasi yang juga diperhitungkan adalah perizinan, sertifikat, ganti rugi tanaman, dengan total biaya investasi adalah Rp 116.748.643.022, serta memperhitungkan biaya reinvestasi yaitu seluruh biaya kecuali biaya tanaman. Berikutnya PT XYZ dan PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) memperhitungkan biaya operasional, untuk pemenuhan input dalam kegiatan produksi yang terhitung adalah biaya perawatan (pupuk, air, listrik, tenaga kerja harian, dll), panen (tenaga kerja harian, transportasi, alat), dan gaji. Perhitungan biaya juga menggunakan pertimbangan tingkat inflasi dari dasar tahun laporan keuangan yang digunakan.

PT XYZ juga menganalisis laba rugi perusahaan berdasarkan penerimaan dikurangi biaya untuk menentukan laba bersih dan pajak. Pendapatan bersih sangat dipengaruhi oleh produksi, harga, serta biaya produksi (Indra et al., 2018). Selanjutnya adalah analisis investasi, yang menghitung arus kas, laporan laba rugi, switching value, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Payback Period (PP). Nilai NPV PT XYZ pada discount rate sebesar 5.3 persen bernilai positif, yaitu sebesar Rp 52.951.448.529, IRR sebesar 7 persen, kemudian Net B/C sebesar nilai 1,49 dan PP pada saat berumur 12 tahun dan 1 bulan. Analisis switching value pada PT XYZ menggunakan indikator batas toleransi yaitu kenaikan biaya produksi (70,46 persen) dan penurunan kapasitas produksi (19,55 persen). Nilai NPV pada PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) adalah Rp 20.676.552.035 dengan discount rate sebesar 18 persen, IRR sebesar 21,4% dan PP pada saat umur 37 bulan/3tahun.

Perkebunan rakyat di Kecamatan Bagan Sinembah juga menghitung analisis finansial dimana nilai NPV yang bernilai positif ($NPV > 0$) dengan nilai Rp 30.113.603, dan dengan nilai IRR sebesar 24,50% dengan nilai bunga bank yang berlaku pada saat itu 12,75% disimpulkan bahwa Perkebunan sawit layak untuk diusahakan. Perhitungan nilai B/C diperoleh sebesar 2,934 yang artinya $B/C > 0$ setiap Rp 1.000 biaya yang dikeluarkan akan diperoleh benefit sebesar Rp 2,934 (Putri et al., 2013).

Pada Perkebunan milik rakyat Perkebunan rakyat di Provinsi Lampung ini juga menghitung analisis finansial, terdiri dari biaya produksi, penerimaan dan pendapatan. Menurut penelitian Pujiharti & Hafif, (2017) pada produksi TBS rata - rata 15105 kg/ha/tahun, dengan produksi terendah sebesar 2.040 kg/ha/tahun dan produksi tertinggi 35.400 kg/ha/tahun. Finansial usahatani di Provinsi Lampung memberikan keuntungan (pendapatan) sebesar Rp 15.261.947/ha/tahun atau Rp11.271.829/ha/bulan, keuntungan diperoleh pada tahun ke 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani kelapa sawit adalah dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh masing-masing petani yang dikalikan dengan harga yang telah ditetapkan setelah itu dikurangi dengan total biaya produksi masing-masing petani kelapa sawit Hidayati (2017). Apabila dibandingkan dengan upah minimum pada regional pendapatan petani kelapa sawit Provinsi Lampung di atas upah minimum provinsi (UMP) Lampung (Rp 1.150.000 per bulan) dan kebutuhan hidup minimum (KHM) sudah mencapai Rp 1.060.082 per bulan. Nilai B/C, IRR dan NPV Perkebunan kelapa sawit masing-masing sebesar 3,98, 54% dan Rp 21.299.679, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai B/C lebih besar dari 1, IRR lebih tinggi dari 13% (bunga kredit berlaku).

Perkebunan milik rakyat di Kabupaten Lampung Tengah untuk keasiapan pada finansial dimana terdiri dari biaya investasi, biaya produksi, penerimaan, serta analisis finansial kelapa sawit. Pada biaya investasi meliputi biaya pembelian bibit, saprodi, dan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk pembuatan lubang tanam, dan penanaman sawit. Biaya bibit kelapa sawit sebesar Rp 2.784.708,34 per hektar, dengan menggunakan 148 batang bibit sawit per hektar, dengan jarak tanam 9x9 m. Jarak tanaman 9 x 9 x 9 m, artinya tanaman kelapa sawit ditanam kedepan 9 m, kebelakang 9m dan kesamping 9 m dan kedalaman lubang tanam 40 cm Attriansyah (2021). Biaya pupuk tanaman kelapa sawit pada masa TBM Rp 818.829,14 per hektar per tahun. Dalam usaha tani, luas penguasaan lahan pertanian merupakan faktor yang sangat penting dalam produksi maupun usaha tani, misalnya kepemilikan atau penguasaan lahan sempit akan kurang efisien dibandingkan dengan lahan yang cukup luas (Tarigan et al., 2021). Pada tingkat upah yang diberikan pada Perkebunan milik rakyat di Kabupaten Lampung Tengah, tenaga kerja laki – laki dan perempuan diberikan sebesar Rp. 40.0000 per hari. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah suatu produk Hidayati (2017). Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk biaya pada masa TBM sebesar Rp 615.600 per hektar per tahun. Biaya produksi Perkebunan milik rakyat di Kabupaten Lampung Tengah yang dikeluarkan terdiri dari biaya pupuk, peralatan, biaya tenaga kerja untuk penyiangan, pemupukan dan pemanenan. Biaya yang dikeluarkan tersebut guna untuk meningkatkan produktivitas serta meningkatkan pendapatan dari Perkebunan. Janis pupuk yang digunakan pada Perkebunan milik rakyat ini yaitu, pupuk kandang, urea, SP36 dan NPK. Biaya pestisida Perkebunan sawit rakyat sebesar Rp 176.205 per hektar per tahun. Biaya peralatan yang dikeluarkan pada Perkebunan sawit milik rakyat di Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 514.654, peralatan yang digunakan diantaranya, cangkul, sabit, tangki semprot, kapak, enggrek, dan rojong. Pada penerimaan Perkebunan sawit rakyat memiliki luas lahan petani pada kisaran 0,01 – 1,00 ha. Tanaman kelapa sawit akan menghasilkan pada umur 5 – 20 tahun (Pujiharti & Hafif, 2017).

Nilai Npv (Rp) pada Perkebunan sawit rakyat sebesar 167.455.232,56 yang artinya layak dijalankan karena nilai Npv lebih besar dari 0. Pada analisis finansial ke 2 yaitu analisis IRR sebesar 47 % artinya jika dibandingkan dengan tingkat bunga saat itu sebesar 9 % pada KUR mikro bank BRI di Kabupaten Lampung Tengah, dapat dikatakan bahwa layak. Nilai Net B/C sebesar 24,84 artinya usaha layak dijalankan dikarenakan lebih dari 1. Nilai Gross B/C yang diperoleh sebesar 5,61 artinya usaha layak dijalankan karena lebih dari 1. Pada nilai waktu pengembalian modal (PP) Perkebunan sebesar 66,24 artinya dapat dikatakan layak untuk dijalankan (Alfizar et al., 2017).

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh pada finansial dan manajemen perkebunan kelapa sawit swasta dan rakyat melalui kajian ini adalah perkebunan swasta memiliki struktur organisasi yang jelas dan aspek organisasi manajerial, sedangkan perkebunan milik rakyat pada manajemen usahanya belum sebaik manajemen usaha milik swasta dikarenakan minimnya pengetahuan tentang teknologi serta manajemen pada pembibitan belum sebaik manajemen swasta. Pada aspek finansial perkebunan kelapa sawit swasta terdapat

biaya reinvestasi yang di bebaskan pada biaya pengeluaran untuk usaha perkebunan kelapa sawit swasta, sedangkan pada rakyat tidak ada ditemukannya biaya *reinvestasi* yang dibebankan pada pengeluarannya. Rata-rata perkebunan swasta menganalisis *switching value* untuk menyiapkan strategi menghadapi tantangan kedepan seperti penurunan produksi ataupun kenaikan biaya produksi. Biaya investasi dan operasional usaha perkebunan kelapa sawit di swasta lebih besar bila dibandingkan pada perkebunan kelapa sawit milik rakyat, karena infrastruktur dan manajemen yang lebih matang sehingga memberikan keuntungan secara finansial lebih besar serta dapat memberikan lapangan kerja yang luas dan beragam bagi masyarakat sekitar. Maka diperlukan dukungan pemerintah membangun sinergi pada pihak swasta dan rakyat agar mampu memproduksi kelapa sawit lebih banyak serta membuat nilai tambah pada kelapa sawit Indonesia. Bagi usaha perkebunan kelapa sawit rakyat dapat mengadaptasi aspek finansial seperti biaya *reinvestasi* dan perhitungan *switching value* dalam menghadapi persaingan semakin dinamis serta membentuk usaha yang lebih profesional sehingga usaha makin berkembang dan tetap eksis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfizar, S., Hasyim, Ali Ibrahim, & Affandi, Muhammad Irfan. (2017). Analisis Kelayakan Finansial Kelapa Sawit Di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*, 5(3), 304–311.
- Attriansyah. (2021). *Kajian Ekonomi dan Finansial Usahatani Kelapa Sawit Sawit (Elaeis Guineensis Jack) Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. Universitas Batanghari.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Perkebunan Indonesia Tahun 2020*. <https://www.bps.go.id/subject/54/perkebunan.html#subjekviewtab3>.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2020). *Statistik Perkebunan Indonesia*.
- Foeh, J. E. H. J. (2011). *Analisis Finansial Perkebunan Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan: Studi Kasus Hak Guna Usaha CV. VSL di Wilayah Gondai, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau*.
- Hidayati, A. (2017). *Analisis Kelayakan Finansial Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Labuhanbatu* [Universitas Sumatera Utara]. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12435/140304029.pdf?sequence=1&isallowed=y>.
- Indra, S. B., Rozalina, R., & Nudin, O. F. (2018). Analisis Kelayakan Finansial Usaha Pembibitan Kelapa Sawit Pada Ud. Jaya Tani Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 5(1), 49–58. <https://doi.org/10.33059/jpas.v5i1.842>.

- Irawan, H. T., & Pamungkas, I. (2020). Studi Kelayakan Investasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Optimalisasi*, 6(April), 40–46.
- Kariyasa, I. K. (2015). Financial Feasibility Analysis Of Oil Palm Certified Seed Adoption In West Kalimantan Province. *Jurnal Agro Ekonomi*, 33(2), 141–159.
- Kasmir, J. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Prenada Media Group.
- Kemenperin. (2020). *Rencana Kementrian Perindustrian Tahun 2020-2024*.
- Murdy, S., Nainggolan, S., & Napitupulu, D. (2021). Analisis Finansial Peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 209–224. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.12501>.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurmalina, R., Sarianti, T., & Karyadi, A. (2018). *Studi Kelayakan Bisnis*. In PT Penerbit IPB Press (Vol. 6, Issue August). IPB Press.
- Pujiharti, Y., & Hafif, B. (2017). Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Proceedings Of The National Seminar On Site-Specific Agroinnovations For Food Security In The Era Of The ASEAN Economic Community). *Repositori Publikasi Kementrian Pertanian*, 1, 1249–1253.
- Putri, D., Darus, H. M. M. B., & Sihombing, L. (2013). *Analisis Kelayakan Finansial Kelapa Sawit Rakyat (Studi Kasus: Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau)*.
- Rahma, A. (2022). *Genjot Produksi Sawit, Malaysia Bakal Pangkas Tarif Pajak CPO Jadi 4 Persen*. IDX Channel. <https://www.idxchannel.com/economics/genjot-produksi-sawit-malaysia-bakal-pangkas-tarif-pajak-cpo-jadi-4-persen>
- Sarasvaty, G. (2018). *Analisis Kelayakan Investasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT XYZ di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah*. Institut Pertanian Bogor.
- Tarigan, E. E. B., Akoeb, E. N., & Hasibuan, S. (2021). Analisis Finansial Pembibitan Kelapa Sawit Pada Produsen Benih di Provinsi Sumatera Utara. *AGRISAINS : Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 3(1), 23–30.